



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN DIAR
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 48747

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.842.410.000**

1. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/100 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp.
275.000.000
7. Tanah Seluas 9198 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp.
919.800.000
8. Tanah Seluas 6700 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp.
670.000.000
9. Tanah Seluas 6194 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI
Rp. 402.610.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 59.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.272.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.558.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.582.468.690
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.082.468.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.